

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak era reformasi di Indonesia, banyak perubahan telah terjadi, terutama dalam pembenahan tata kelola keuangan negara. Tanda reformasi pengelolaan keuangan nasional adalah dengan adanya undang-undang yang mengatur bidang keuangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lahirnya ketiga undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkeinginan kuat untuk mewujudkan good government governance di bidang keuangan nasional. Selain itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara.

Perwujudan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan nasional dapat diupayakan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus mengikuti prinsip ketepatan waktu dan menyusun standar akuntansi yang dianut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Standar akuntansi pemerintah yang dimaksud yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang mana bertujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual yang dimaksud ialah, suatu sistem akuntansi dimana transaksi-transaksi ataupun peristiwa ekonomi yang diakui pencatatan dan penyajiannya, berdasarkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi tersebut tanpa mempertimbangkan faktor waktu kas.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, membawa perubahan besar terhadap sistem pengelolaan laporan keuangan pemerintah dimana yang awalnya sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, menjadi basis akrual penuh terhadap pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Cohen, et, al (2007) menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berbasis akrual bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah, karena akuntansi berbasis kas tidak lagi memuaskan, seperti kurangnya gambaran laporan keuangan yang akurat dan lemahnya informasi yang didapat untuk manajemen dalam menentukan perencanaan dan proses kinerja suatu perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan, menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode kerja. Laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas dari suatu entitas serta media informasi akuntansi, yang

bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

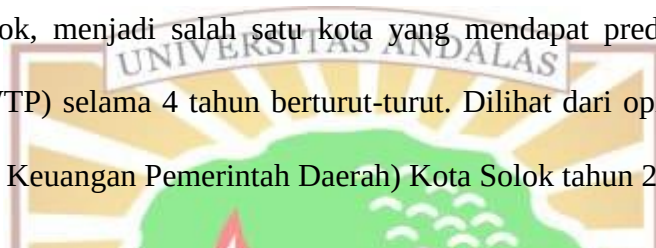
Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas publik tersebut, diperlukan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan berkaitan tentang penyajian laporan keuangan yang memuat informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan ini yang kemudian, dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomik. Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang mana diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.

Laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan tersebut haruslah memenuhi standar akuntansi pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami serta dapat dibandingkan.

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil pemeriksaan berupa opini. Di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 opini BPK yang dilakukan secara bertingkat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat

(*disclaimer opinion*). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ini, bertujuan memberikan pendapat atau opini terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mendapatkan tingkat kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan.

Kota Solok, menjadi salah satu kota yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut. Dilihat dari opini audit BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Solok tahun 2016-2019.



Tabel 1.1

Daftar Opini Hasil Audit BPK atas LKPD Kota Solok

No	Tahun	Hasil BPK
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : <http://sumbar.bpk.go.id>



Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2016 hingga tahun 2019 Kota Solok memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut dimana telah menerapkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di tahun 2018.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik, tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah dan penerapan SAP yang berlaku. Pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik, mengikuti pelatihan dan pendidikan serta memiliki perilaku yang baik. Hal tersebut untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam memahami logika akuntansi dengan baik.

Warisno (2008) berpendapat bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Ihsanti (2014) berpendapat bahwa kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Kompetensi SDM ini yang akan mendasari individu dalam mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya yang berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian entitas yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nidya (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimana dinyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Delanno dan Deviani (2013) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berikut : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
- b. Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Pengujian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia tentang akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini merupakan bagian yang memuat konsep teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab masalah dalam penelitian. Konsep-konsep teoritis ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini yang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bagian ini yang menjelaskan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, bagian ini yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran bagi pengguna penelitian ini.

